



Judul : DPR Myanmar Komitmen Dukung Rohingya
Tanggal : Selasa, 28 Agustus 2012
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Myanmar Komitmen Dukung Rohingya

JAKARTA — Misi diplomatik Fraksi PKS ke Myanmar berbuah komitmen. Parlemen Myanmar menyatakan, memang ada rencana untuk mengamendemen UUD Myanmar (1982) yang tidak memasukkan Rohingya sebagai bagian dari etnis Myanmar. Bila amendemen itu berhasil, etnis Rohingya akan mendapat status hukum sebagai warga negara yang sama dengan etnis lain di Myanmar.

Komitmen ini, menurut Ketua Rombongan Fraksi PKS yang ikut berdialog dengan Parlemen Myanmar Hidayat Nur Wahid, sangat baik. Hidayat menjelaskan, dalam pertemuan itu, ketua Parlemen Myanmar menegaskan bahwa tidak boleh ada warga negara tanpa kewarganegaraan termasuk warga Rohingnya. "Mereka berkomitmen akan segera melakukan amendeman undang-undang dasar agar mengakomodasi etnik Rohingnya sebagai warga negaranya," kata Hidayat dalam jumpa pers, Senin (27/8).

Hidayat menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud untuk mengajari Parlemen Myanmar, tetapi ada komitmen untuk menyelesaikan soal Rohingnya ini. "Solusinya jelas, kami partai Islam terbesar di Indonesia dan umat Buddha di Indonesia hanya 0,6 persen, tetapi bisa hidup rukun serta damai," katanya.

Selama enam hari (21-26 Agustus) di Myanmar, delegasi Fraksi PKS yang ber-

jumlah tujuh orang berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan di sana. Fraksi PKS bertemu pemerintah, DPR, DPD Myanmar, serta perwakilan masyarakat etnis Muslim Rohingnya dan ormas Muslim Myanmar. Dari dialog intensif dengan mereka ini, akar konflik Rohingnya meliputi masalah intoleransi perbedaan etnis, sejarah, agama, termasuk kinerja pemerintah pusat dan lokal.

Hidayat menekankan, Myanmar pernah mengakui etnis Muslim Rohingnya sebagai warga negara. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Jenderal Aung San, ayah dari tokoh prodemokrasi Myanmar saat ini, Aung San Suu Kyi. Saat itu, Myanmar juga negeri yang memiliki posisi terhormat di mata dunia, bahkan salah seorang putra bangsanya ada yang diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu U Than.

Parlemen Myanmar, kata Hidayat, mengapresiasi kunjungan Fraksi PKS DPR dan sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan, wakil dari pimpinan Parlemen Myanmar menyatakan jaminannya bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya, termasuk soal status kewarganegaraan etnis Muslim Rohingnya.

Menteri Sosial Myanmar U Aung Kyi juga menghargai upaya diplomatik Fraksi PKS dan menyatakan siap untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik.

■ ed: stevy maradona